



IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LAPAS KELAS IIB PASURUAN

Dinta Fernanda Maulidya, Ananta Prathama¹

¹ Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 5 Mei 2025

Disetujui: 30 Juni 2025

Dipublikasikan: 15

Oktober 2025

Kata kunci:

Implementasi;

Lembaga

Pemasyarakatan;

Program Pembinaan

Kemandirian;

Reintegrasi Sosial;

Warga Binaan

Permasyarakatan

Abstrak

Penelitian ini menelaah terkait implementasi program pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya meningkatkan kompetensi dan kesiapan warga binaan untuk reintegrasi sosial melalui program pembinaan yang efektif. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis proses implementasi, hambatan yang dihadapi, serta dampak positif dari program tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berbasis teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Pasuruan melibatkan kolaborasi berbagai pihak dan memberikan manfaat nyata bagi WBP, seperti peningkatan keterampilan dan kesiapan reintegrasi sosial. Keberhasilan program didukung oleh komitmen sumber daya, sinergi aktor, serta responsivitas pelaksana dalam menghadapi tantangan struktural dan kebutuhan WBP. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi program berjalan cukup baik, namun masih terdapat tantangan terkait sumber daya, fasilitas, hingga faktor lingkungan sehingga perlu diperhatikan kembali terutama saat pindah ke lapas terintegrasi. Meskipun terdapat beberapa hambatan, pegawai serta WBP dapat mengatasi masalah tersebut dengan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan.

IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR CORRECTIONAL ASSISTED RESIDENTS (WBP) IN PRISON CLASS IIB PASURUAN

Keywords:
Implementation;
Correctional
Institution;
Independence
Development
Program; Social
Reintegration;
Correctional
Inmates

Abstract

This study examines the implementation of the independence coaching program for inmates at Pasuruan Class IIB Prison. The background of this study is based on the importance of improving the competence and readiness of inmates for social reintegration through an effective coaching program. The main objectives of the study are to analyze the implementation process, obstacles faced, and the positive impacts of the program. The method used in this study is descriptive qualitative with interview, observation, and documentation techniques. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on policy implementation theory according to Merilee S. Grindle, as well as triangulation of sources and methods to ensure data validity. The results of this study show that the implementation of the independence coaching program at Class IIB Pasuruan Prison involves collaboration from various parties and provides real benefits for inmates, such as skills enhancement and social reintegration readiness. The success of the program is supported by resource commitment, synergy of actors, and the responsiveness of the implementers in addressing structural challenges and the needs of the inmates. The conclusion of the study confirms that the implementation of the program is going quite well, but there are still challenges related to resources, facilities, and environmental factors that need to be reconsidered, especially when moving to an integrated prison. Although there are several obstacles, employees and inmates can overcome these problems with appropriate solutions according to field conditions.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉Alamat korespondensi:
21041010078@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dilandasi oleh prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang adil dan berlaku. Hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat yang dinamis serta menjadi landasan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Irmawanti dan Arief (2021), hukum memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan norma dan pedoman hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku

menyimpang atau kriminalitas yang dapat membahayakan sesama warga dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun terdapat jaminan keadilan dan kepastian hukum, hal ini tidak menjamin bahwa Indonesia terbebas dari tindakan kejahatan, setiap orang berpotensi melakukan tindakan kejahatan yang berpotensi untuk dijatuhi hukuman pidana baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini dapat dilihat pada angka kriminalitas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi secara signifikan. Hal ini menggambarkan tantangan kompleks yang dihadapi oleh sistem hukum dan penegakan keadilan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengindikasikan bahwa kasus kriminalitas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2018 hingga 2023 seperti berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Kriminalitas di Indonesia pada Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas
2018	204.654
2019	178.207
2020	247.780
2021	257.743
2022	276.507
2023	288.742

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Berdasarkan data jumlah kasus kriminalitas dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dan tren kenaikan kasus kriminalitas di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat 204.654 kasus, kemudian menurun menjadi 178.207 kasus pada 2019. Namun, pada tahun 2020 kasus kriminalitas melonjak tajam menjadi 247.780, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya: 257.743 kasus di 2021, 276.507 kasus di 2022, hingga mencapai 288.742 kasus pada 2023. Peningkatan signifikan setelah tahun 2019 ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19, perubahan kebijakan, atau peningkatan pelaporan dan penegakan hukum.

Meninjau tingkat kriminalitas yang terus meningkat ini, terutama di Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi ketiga tertinggi secara nasional dengan 17.642 kasus pada tahun 2023, memberikan tekanan tersendiri terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kenaikan tersebut menunjukkan kebutuhan kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pembinaan bagi narapidana yang tidak hanya fokus

pada aspek hukuman, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan keterampilan sebagai upaya integrasi kembali ke masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, program pembinaan kemandirian narapidana mendapatkan perhatian penting dalam literatur dan praktik masyarakat. Berbagai penelitian terdahulu menawarkan perspektif dan pendekatan berbeda dalam pelaksanaan program ini di beragam lembaga masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Sultan Fatahilah dan Odi Jarodi (2023) di Lapas Kelas I Medan menyoroti pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bertujuan meningkatkan keterampilan narapidana. Hasil penelitian mengungkapkan meskipun minat narapidana tinggi untuk mengikuti pelatihan keterampilan, implementasi program belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas pembimbing. Studi ini memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor nyata yang mempengaruhi keberhasilan program pembinaan.

Di tempat lain, penelitian Mochamad Naufal Adisaputra dan Mitro Subroto (2022) di Lapas Kelas IIA Cibinong meneliti kendala dalam pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana. Studi ini menemukan potensi yang baik dalam program pembinaan kemandirian dalam mendukung pengembangan keterampilan narapidana, namun menghadapi kendala akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung lainnya.

Berbeda dengan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Pasuruan yang telah memiliki program unggulan berupa konveksi jahit yang berjalan lebih optimal, sebagaimana diungkapkan dalam laporan penelitian terakhir, hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan sosial masing-masing lembaga masyarakat. Temuan ini konsisten dengan perbedaan teori yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya banyak menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, sementara penelitian di Pasuruan menerapkan teori Merilee S. Grindle yang menekankan kesesuaian antara konten kebijakan dan konteks implementasi program.

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menghubungkan antara kebijakan pembinaan kemandirian dengan konteks implementasi nyata di lapas melalui teori Merilee S. Grindle dan fokus pada analisa hambatan yang dihadapi oleh petugas serta dampak positif bagi warga binaan. Studi ini akan memperdalam pemahaman tentang efektivitas program pembinaan kemandirian yang belum banyak dieksplorasi di lokasi penelitian ini, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pengembangan program masyarakat di Indonesia.

Permasalahan penelitian dirumuskan berdasarkan uraian tersebut yaitu: Bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pasuruan? Apa hambatan yang dialami oleh petugas dalam pelaksanaan program ini? Dan, bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh warga binaan dari program pembinaan kemandirian tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pasuruan, termasuk mengidentifikasi kendala yang dialami oleh petugas serta menilai dampak positif yang dirasakan oleh para narapidana sebagai hasil dari program tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan reintegrasi sosial narapidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai implementasi program pembinaan kemandirian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara terstruktur, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan dokumen lain yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian terkait implementasi program pembinaan kemandirian pada WBP di Lapas Kelas IIB Pasuruan meliputi kepala sub seksi kegiatan kerja, penanggung jawab program, warga binaan pemasyarakatan, serta mantan narapidana. Teknik analisis data melalui beberapa tahap dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis dengan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh 2 hal yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi sebagai berikut:

A. Konten Kebijakan

Konten kebijakan menurut Merilee S. Grindle adalah unsur-unsur isi kebijakan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Konten kebijakan mencakup 5 variabel seperti pengaruh kepentingan yang terlibat, jenis manfaat yang

diberikan, tingkat perubahan yang ingin dicapai, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, serta komitmen terhadap sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Pengaruh Kepentingan yang Terlibat

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Pasuruan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Pihak utama yang terlibat adalah Lapas Kelas IIB Pasuruan sebagai pelaksana utama, di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Provinsi Jawa Timur serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Selain itu, terdapat keterlibatan aktif dari Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari yang membawahi program pelatihan keterampilan, serta perusahaan swasta seperti PT Sentosa Garmino dan PT Behaestex yang menjadi mitra dalam pelatihan dan produksi konveksi. Di bidang lain, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Pendidikan, serta NGO non-profit juga turut berperan dalam memberikan pelatihan teknis dan pendampingan, baik kepada petugas maupun WBP. Kolaborasi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kepentingan berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Setiap pihak membawa kepentingan masing-masing, baik dalam bentuk pembinaan, pengembangan keterampilan, maupun pengawasan dan pemasaran hasil produksi WBP.

2. Jenis Manfaat yang Diberikan

Program pembinaan kemandirian memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi WBP, tetapi juga bagi institusi Lapas dan mitra kerja sama. Bagi WBP, manfaat utama adalah peningkatan keterampilan kerja, seperti menjahit, bertani, beternak, hingga barista, yang dapat menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, WBP memperoleh penghasilan dari hasil produksi, misalnya produksi konveksi yang mampu mencapai 20 kodi per hari dan dipasarkan ke berbagai pihak. Bagi Lapas, program ini meningkatkan citra dan kapasitas lembaga sebagai pelopor pembinaan berbasis keterampilan dan teknologi, serta memperkuat hubungan dengan mitra eksternal. Bagi mitra, terutama perusahaan swasta, program ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan juga membuka peluang pasar baru dari hasil produksi WBP. Secara umum, manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis, karena mampu meningkatkan kepercayaan diri WBP dan menurunkan tingkat pelanggaran tata tertib di dalam lapas.

3. Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Tingkat perubahan yang diharapkan dari implementasi program ini adalah terciptanya WBP yang mandiri, produktif, dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Perubahan ini diukur dari beberapa indikator, seperti peningkatan keterampilan kerja, penurunan angka pelanggaran tata tertib, serta peningkatan partisipasi WBP dalam program pelatihan. Sebanyak 347 WBP telah memenuhi syarat dan mengikuti program pembinaan ini dari total 780 WBP yang ada di Lapas Kelas IIB Pasuruan. Selain itu, perubahan juga diharapkan terjadi pada pola pikir dan perilaku WBP, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan produktif. Program ini juga mendorong perubahan pada sistem pembinaan di Lapas, dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi informasi, sejalan dengan konsep *smart prison* yang tengah dikembangkan di Lapas terintegrasi Tapaan.

4. Lokasi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi. Pada tingkat strategis, keputusan diambil oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian didelegasikan ke Kepala Lapas Kelas IIB Pasuruan. Di tingkat pelaksana, keputusan teknis diambil oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta para penanggung jawab program di bidang konveksi, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Setiap keputusan penting terkait pelaksanaan program, kerja sama dengan mitra, hingga evaluasi hasil kerja, dilakukan melalui koordinasi lintas bagian dan melibatkan masukan dari pihak eksternal seperti BLK Singosari dan perusahaan mitra. Sistem pengambilan keputusan ini menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi, sesuai dengan visi dan misi Lapas.

5. Pelaksana Program

Pelaksana utama program pembinaan kemandirian adalah Lapas Kelas IIB Pasuruan, yang didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik. Di lapangan, pelaksanaan program dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan dari mitra eksternal, seperti BLK Singosari dan PT Sentosa Garmino. Selain itu, terdapat peran penting dari instruktur dan pengawas yang berasal dari perusahaan mitra, yang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan WBP. Dalam beberapa program, mantan WBP yang telah sukses juga dilibatkan sebagai asisten pelatih, memberikan motivasi dan contoh nyata bagi peserta lain. Pelaksanaan

program juga melibatkan WBP secara aktif, baik sebagai peserta pelatihan maupun sebagai tenaga kerja dalam kegiatan produksi.

6. Komitmen terhadap Sumber Daya

Komitmen terhadap sumber daya menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program ini. Lapas Kelas IIB Pasuruan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, seperti ruang konveksi khusus, peralatan kerja, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, alokasi anggaran untuk pelatihan dan kerja sama dengan mitra eksternal juga menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan jumlah pegawai, terutama petugas perempuan, serta overkapasitas hunian yang mencapai hampir tiga kali lipat dari kapasitas ideal. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Lapas melakukan optimalisasi sumber daya yang ada dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis. Komitmen ini juga tercermin dalam upaya pelatihan berkelanjutan bagi petugas dan WBP, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program.

B. Konteks Implementasi

Konteks implementasi menurut Merilee S. Grindle adalah lingkungan atau situasi di mana suatu kebijakan dijalankan meliputi 3 variabel di antaranya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut; karakteristik institusi dan rezim yang ada sebagai lingkungan institusional; serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Setiap aktor yang terlibat dalam program pembinaan kemandirian memiliki kekuasaan dan kepentingan masing-masing, serta menerapkan strategi tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Lapas sebagai pelaksana utama memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengawasi jalannya program, serta menentukan kebijakan internal. Mitra eksternal seperti BLK Singosari dan perusahaan swasta memiliki kekuasaan dalam hal pemberian pelatihan dan pengawasan teknis, serta kepentingan dalam pengembangan SDM dan pemanfaatan hasil produksi. Dinas terkait dan NGO berperan sebagai pendukung teknis dan advokasi, dengan kepentingan pada pengembangan masyarakat dan pemberdayaan WBP. Strategi yang digunakan meliputi pembagian peran yang jelas, koordinasi rutin, serta pemberian insentif bagi mitra yang berkontribusi aktif. Sinergi antar aktor ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan dan memastikan keberlanjutan program.

2. Karakteristik Institusi dan Rezim yang Ada

Karakteristik institusi Lapas Kelas IIB Pasuruan ditandai oleh struktur organisasi yang hierarkis namun adaptif, dengan pembagian tugas yang jelas dan akuntabel. Lapas ini juga berada dalam rezim kebijakan pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya. Selain itu, Lapas Kelas IIB Pasuruan tengah mengembangkan konsep smart prison yang berbasis teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan. Karakter institusi yang terbuka terhadap inovasi dan kerja sama lintas sektor menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya. Rezim kebijakan yang berlaku juga memberikan ruang bagi pelibatan pihak eksternal dan penerapan prinsip-prinsip HAM, sehingga program pembinaan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana program di Lapas Kelas IIB Pasuruan tergolong tinggi, sebagaimana terlihat dari konsistensi pelaksanaan program sesuai regulasi dan arahan dari pusat. Petugas lapas secara aktif mengikuti pelatihan dan pembinaan, serta responsif terhadap kebutuhan dan masukan dari WBP maupun mitra eksternal. Evaluasi rutin dilakukan untuk memantau perkembangan program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Responsivitas juga ditunjukkan dalam upaya penyesuaian program dengan kebutuhan aktual WBP, seperti penambahan jenis pelatihan dan perbaikan fasilitas. Tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip-prinsip HAM juga menjadi perhatian utama, guna memastikan bahwa hak-hak WBP tetap terjaga selama menjalani pembinaan. Secara keseluruhan, pelaksana program mampu menunjukkan kinerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sumber daya.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Pasuruan berjalan efektif dengan melibatkan berbagai pihak seperti petugas lapas, dinas terkait, BLK Singosari, Bapas Kota Malang, dan perusahaan swasta, sehingga membentuk jaringan dukungan yang solid dan relevan dengan kebutuhan reintegrasi sosial WBP. Program ini memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan keterampilan,

pengetahuan, penghasilan tambahan, hingga kepercayaan diri dan kesiapan WBP untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur dengan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan sumber daya yang memadai meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas petugas.

Secara keseluruhan, perubahan positif pada perilaku dan keterampilan WBP sudah mulai terlihat, didukung oleh sistem pengambilan keputusan yang bertahap dan fleksibel, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat. Tingkat partisipasi dan motivasi WBP cukup tinggi, namun tetap diperlukan upaya motivasi dan dukungan berkelanjutan agar manfaat program semakin optimal. Karakter institusi yang adaptif dan kolaboratif menjadi kekuatan utama, meski tantangan efisiensi anggaran dan distribusi sumber daya masih harus diatasi agar program pembinaan kemandirian ini dapat terus berkembang dan memberi dampak berkelanjutan.

Saran

1. Melakukan evaluasi berkala agar program selalu sesuai kebutuhan pasar kerja dan berikan pendampingan pasca-bebas untuk menjaga keberlanjutan kemandirian WBP.
2. Menerapkan pendekatan personal dan penghargaan atas prestasi untuk meningkatkan motivasi serta partisipasi aktif WBP.
3. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak program bagi WBP, masyarakat, serta kesesuaiannya dengan kondisi lapas.
4. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan workshop agar pembinaan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 176-183.

Badan Pusat Statistika, Statistik Kriminal 2023 Volume 14, 2023

Fatahilah, S., & Jarodi, O. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).

- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Jefri, M. (2021). Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 128-137.
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Manting, L. (2022). Analisis Implementasi Program Keterampilan dan Kegiatan Kerja Bagi Narapidana Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 64-69.
- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 176-183.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. *Umsida Press*, 1-92.
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian. Penerbit Kbm Indonesia
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, 13(2), 123-138.
- Sari, E., Dharma, A. S., & Jumaidi. (2024). Implementasi program pembinaan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus pada program pembinaan kemandirian). *Jurnal Kebijakan Publik*.